

Donal Fariz

Indonesia Corruption Watch

Keuangan Partai dan Persoalannya.



**INTERNATIONAL BUSINESS
INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018**

Take Action to Build Business Integrity

Jakarta, 4-5 December 2018

Sumber Keuangan Partai

- Selama kurun 30 tahun terakhir, dunia mengalami dua masalah utama demokrasi. *Pertama*, ledakan “cost electoral campaign” karena media advertisement menjadi central tools interaksi antara partai dengan pemilih. *Kedua*, matinya *mass party*.
- Sebagai akibatnya, partai kesulitan dalam pendanaan.
- Maka dari itu, diperkenalkan model *public party financing* (Jerman dan Turkey) dan *state subsidy*
- State subsidy menghadirkan dua perdebatan. Kelompok kontra menganggap hal ini akan mengisolasi partai dari grass root, sedangkan kelompok pro menganggap ini sebagai alternatif pendanaan yang modern pasca mass party



Sumber Keuangan Partai

1. Dana partai politik berasal dari tiga sumber;
 - a) iuran anggota
 - b) sumbangan yang sah menurut hukum
 - c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sumbangan bisa berupa uang, barang, dan/atau jasa. Bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Jumlah sumbangan perseorangan anggota Partai Politik diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sedangkan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Untuk perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000,00 per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
4. Sumbangan didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.



Sumber Pendanaan Parpol Peruntukan Dana

Pelaporan Dana



Gurita Persoalan Keuangan Partai

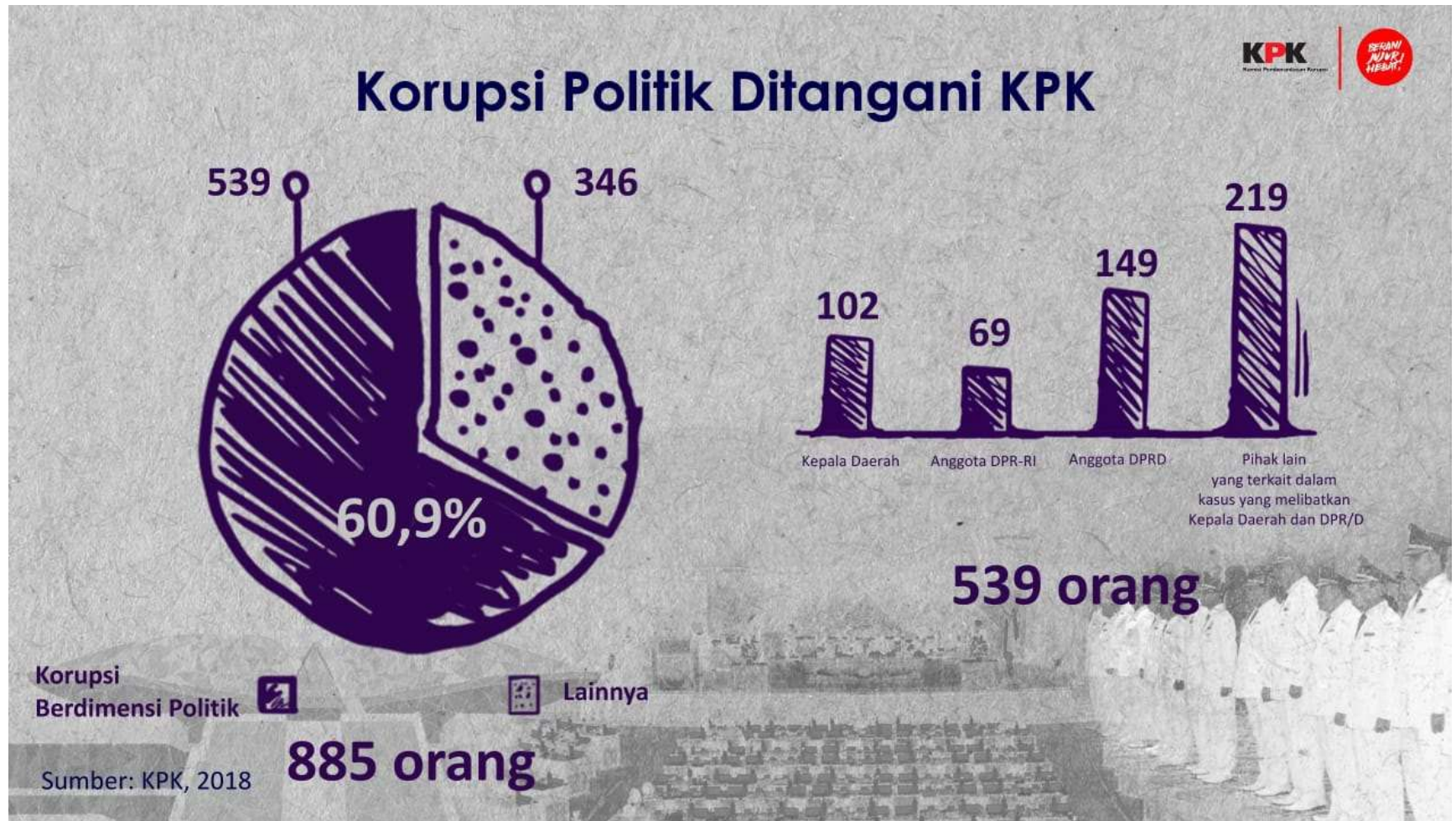


INTERNATIONAL BUSINESS
INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

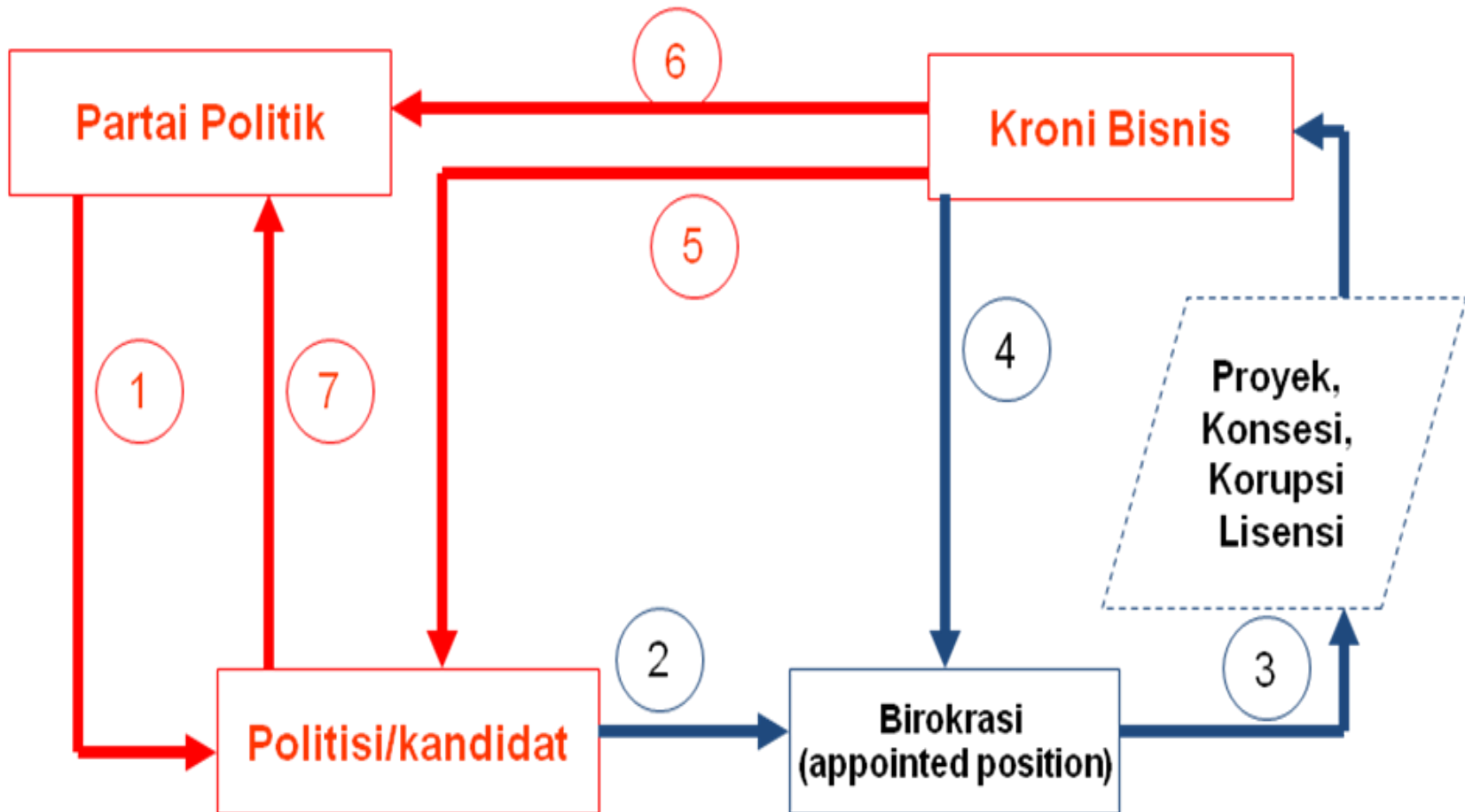
Take Action to Build Business Integrity

London, 6-7 November 2018

Korupsi Berdimensi Politik



Lingkaran Setan Korupsi Politik



Legal and Illicit Financing

No	Aktor	Modus Sumbangan
1	Anggota Partai (Legislatif)	Mendanai seluruh kegiatan partai
		Mendanai sebagian aktivitas partai
		Memberi setoran kepada petinggi partai
2	Anggota Partai (Eksekutif)	Fee penempatan pejabat eselon di kementerian/lembaga
		Mendanai kegiatan partai secara penuh atau sebagian
		Mendorong proyek/kegiatan di kementerian/lembaga untuk mendukung kepentingan partai
3	Organisasi Sayap Partai	Mengumpulkan fee dari perusahaan yang mendapat proyek di kementerian yang telah dikuasai partai tertentu
4	Pihak Ketiga (Perseorangan/Badan Usaha)	Memberi sumbangan di atas batas maksimal yang ditentukan dalam aturan
		Mendanai kegiatan/aktivitas partai

Kendala transparansi

- Sulit dipastikan pengeluaran partai yang sesungguhnya, karena partai tidak transparan kepada publik dalam hal jumlah pendanaan mereka
- Pembukuan partai sangat buruk dan tidak terkonsolidasi.
- Informasi keuangan partai masih dianggap sebagai rahasia dapur. Sehingga tidak untuk diketahui oleh publik luas.
- Karakter sumbangan pihak ke-3 lebih suka secara langsung kepada personal.
- Banyak donors enggan menyumbang kepada partai karena tidak jelas penggunaannya. Yang terjadi, donors membentuk relasi dengan kandidat >> *“offering more predictable returns should that person win office”* (Marcus Mietzner)

Temuan hasil Sengketa Informasi

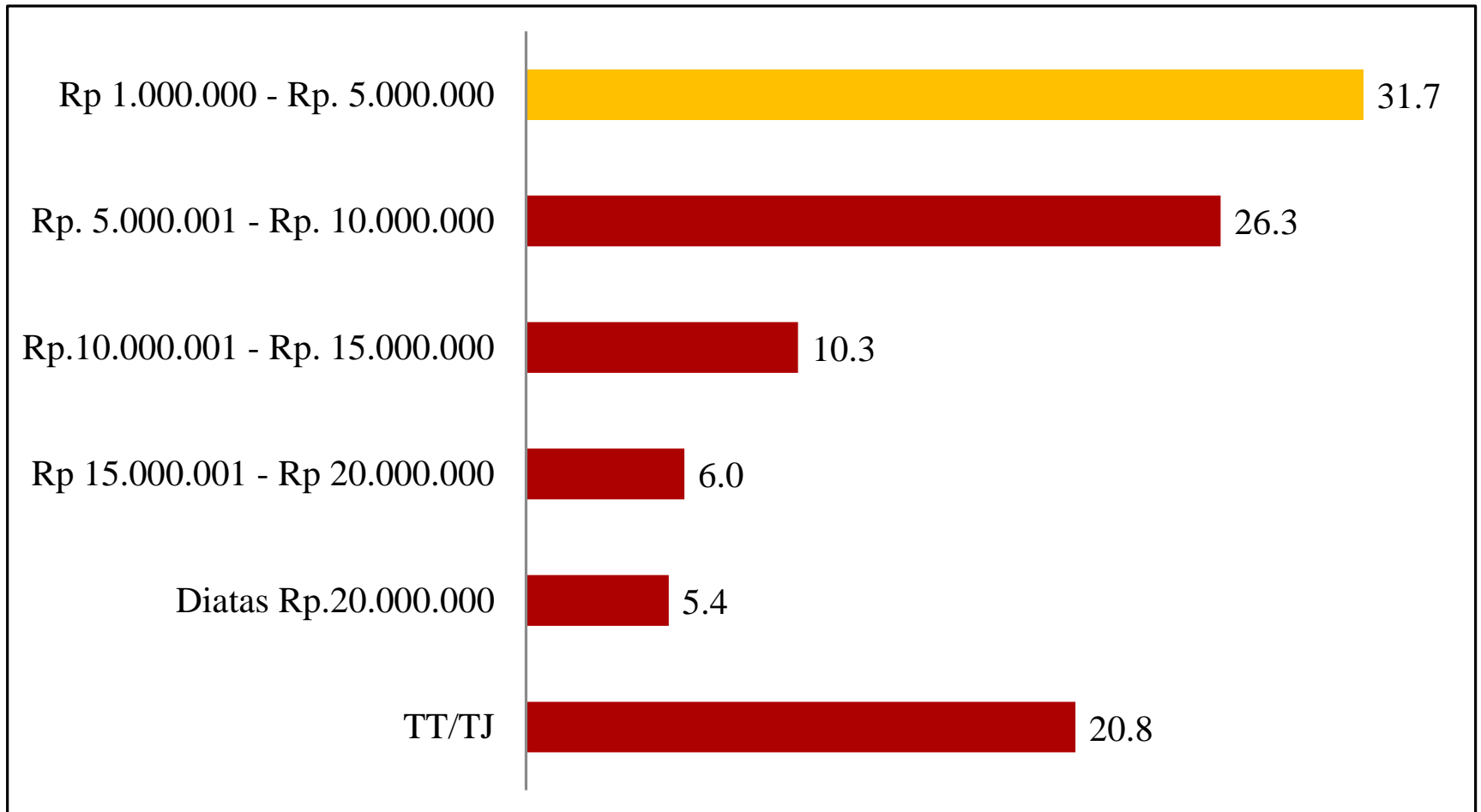
No	DPP Partai Politik	Pengeluaran	Aktiva (Aset Lancar+Tetap)	Pendapatan	Keterangan
1	DPP Partai Demokrat	x	x	x	Belum Menyerahkan
2	Partai Golkar	Rp.25.944.322.494	Rp.2.638.853.346	Rp. 25.637.642.163	Laporan DPP
3	PDI Perjuangan	x	x	x	Belum Menyerahkan
4	PKS	Rp. 140.253.279.158	Rp.114.037.322.850	Rp.179.535.599.140	Laporan Konsolidasi
5	PAN	Rp.2.317.920.020	Rp.2.692.517.133	Rp.2.875.189.495	Laporan DPP
6	PKB	Rp. 963.483.591	-	Rp. 2.234.907.132	Rekapitulasi Laporan Keuangan.
7	PPP	Rp.4.671.234.077	Rp. 23.849.526.024	Rp. 6.456.762.813	Laporan DPP
8	Hanura	x	x	x	Belum Menyerahkan
9	Gerindra	x	x	x	Belum Menyerahkan Proses Audit.

Asumsi Kebutuhan HANURA *(ICW 2015)*

Menggunakan informasi dan data dari PKS dan Hanura sebagai baseline penghitungan kebutuhan partai untuk setiap tahunnya.

Nomor	Tingkatan	Unit	biaya perunit	Jumlah pertahun
1	DPP	1	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00
2	DPD	34	561,000,000.00	19,074,000,000.00
3	DPC	503	314,400,000.00	158,143,200,000.00
				196,717,200,000.00

Biaya perbulan kebutuhan PDIP kab/kota (*Study CSIS*)

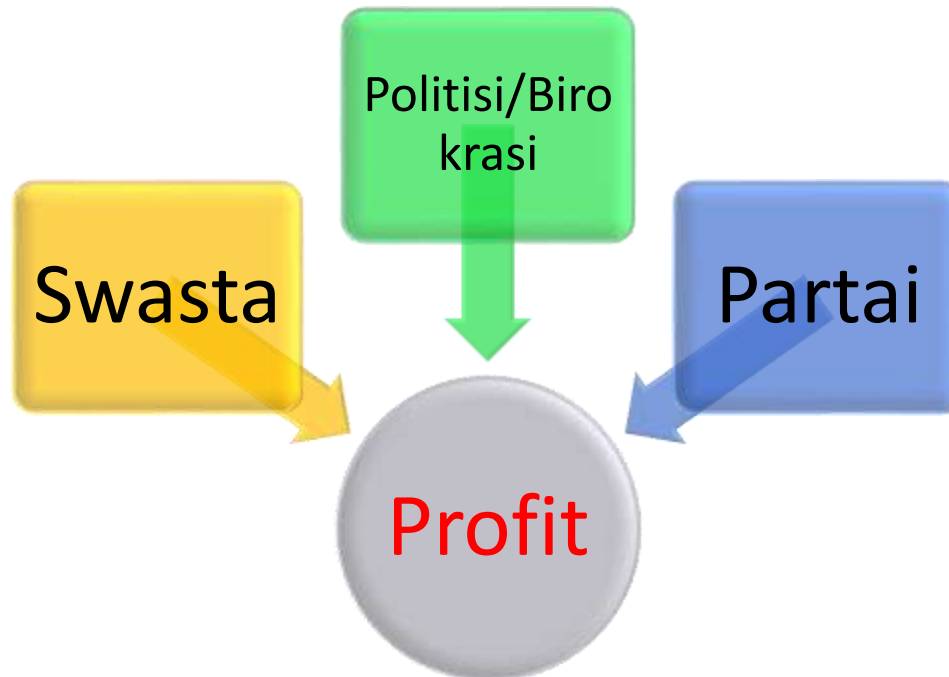


Swasta-Partai- Politisi

- Keterangan Enny Maulana Saragih yang menyebutkan Partai Golkar meminta yang bersangkutan mengawal Proyek PLTU Riau 1
- Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah yang menyebut adanya dugaan suap yang mengalir ke PDIP senilai Rp5 miliar yang dilakukan di markas DPP PDIP.
- Keterangan Zumi Zola yang mengakui kader PAN meminta jatah proyek sebesar 100 Milyar di Provinsi Jambi
- Mantan Bendahara Demokrat, Nazaruddin yang membentuk Group Permai untuk menggarap proyek-proyek negara
- PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang dibentuk Setya Novanto dan Andi Narogong dalam kasus E-KTP.
- Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq yang menerima suap dari PT Indoguna Utama dalam kasus suap impor sapi.

Swasta – Politisi/Birokrasi - Partai

- Sejumlah kasus menunjukkan dua pola. Adakalanya swast aktif dan disisi lain politisi/ partai yang aktif. Namun keduanya bertemu pada kepentingan mengejar profit
- Maraknya perilaku perdagangan pengaruh





INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

Take Action to Build Business Integrity

Jakarta, 4-5 December 2018

THANK YOU